

**ANALISIS TATA KELOLA AIR  
(Studi Kasus Program Sumur Gali Pemerintah Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan)**

**Nofri Arwadi Missa<sup>1</sup>, Ananias Riyoan Philip Jacob<sup>2</sup>, Yohanes Fisher Keon<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program studi ilmu politik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik  
Universitas Nusa Cendana Kupang

Email: [arwadinofri@gmail.com](mailto:arwadinofri@gmail.com)

---

INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :07-10-2025

Revised :16-10-2025

Accepted :27-10-2025

**Keywords:** Water  
Management, Dug Well  
Program, Batnun Village

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

**ABSTRACT**

*Water management in Batnun Village is one example of where the government's dug well program has been implemented. However, an evaluation of the program's effectiveness is needed to understand the extent to which the dug well program has succeeded in distributing access to clean water in rural areas. Through a case study in Batnun Village, the author aims to examine how dug wells are managed in Batnun Village in providing clean water for the village community.*

**ABSTRAK**

Tata kelola air bersih di Desa Batnun merupakan salah satu contoh kasus di mana program sumur gali pemerintah telah diimplementasikan. Namun, evaluasi terhadap efektivitas program tersebut perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana tata kelola program sumur gali tersebut berhasil dalam mendistribusikan akses air bersih di kawasan pedesaan. Melalui studi kasus di Desa Batnun, penulis ingin melihat bagaimana tata kelola sumur gali di Desa Batnun dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat Desa.

## PENDAHULUAN

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2004. Air merupakan kebutuhan pokok manusia, dan yang merupakan bagian integral dari kehidupan manusia serta tidak dapat terpisahkan. dalam kehidupan sehari-hari, air sangat diperlukan untuk mencuci, mandi, memasak dan minum, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia. Karena begitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah kehidupan itu sendiri. Orang yang mencemari sumber air, mengotori air dan membuat polusi terhadap air berarti merusak kehidupan itu sendiri.

Air merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. pentingnya penyediaan air untuk kelancaran aktifitas masyarakat, maka peningkatan kebutuhan terhadap penyediaan air bersih perlu ditindaklanjuti dengan menyediakan layanan penyediaan air bersih baik itu dari pemerintah, swasta maupun dari masyarakat itu sendiri. Undang-undang yang mengatur tentang sumber air yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Akses air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia, terutama di kawasan pedesaan di mana sumber air bersih sering kali terbatas dan sulit dijangkau. Ketersediaan air bersih yang memadai memiliki dampak langsung terhadap kesehatan, sanitasi, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, masih banyak wilayah pedesaan di Indonesia, termasuk Desa Batnun di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih yang aman dan layak.

Dalam upaya meningkatkan akses air bersih di kawasan pedesaan, pemerintah seringkali menerapkan program pembangunan sumur gali. Program ini bertujuan untuk menyediakan sumber air bersih yang mudah diakses bagi masyarakat pedesaan, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mereka. Namun, meskipun upaya ini dilakukan, masih ada tantangan dalam efektivitas program sumur gali pemerintah di banyak wilayah.

Desa Batnun merupakan salah satu contoh kasus di mana program sumur gali pemerintah telah diimplementasikan. Namun, evaluasi terhadap efektivitas program tersebut perlu dilakukan untuk memahami sejauh mana tata kelola program sumur gali tersebut berhasil dalam mendistribusikan akses air bersih di kawasan pedesaan. Melalui studi kasus di Desa Batnun, penulis ingin melihat bagaimana tata kelola sumur gali di Desa Batnun dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat Desa.

Dalam membantu masyarakat pemerintah Desa Batnun membuat sumur gali serta menyalurkan air menggunakan dinamo yang melampaui tiga titik tempat yaitu titik pertama membangun bak untuk menampung air dan menyalurkan ke titik ke dua dan titik ke tiga. Tiga titik tersebut masing-masing tempat tidak strategis karena bak yang di bangun dan air yang di salurkan mendekati sumur galian masyarakat

sedangkan masyarakat yang jauh tidak menikmati atau tidak menggunakan air yang di salurkan pemerintah. Masyarakat lebih memilih sumur gali dibandingkan bak Karena diwajibkan membayar Rp.10.000/bulan untuk pengisian pulsa listrik. Ada kalanya juga air yang mengalir tidak lancar, sedangkan jarak yang di tempuh dengan. air yang di sediakan pemerintah Desa Batnun di gunakan oleh masyarakat tertentu karena penempatan air di tiga tempat tersebut tidak strategis sedangkan masyarakat yang jauh dari jangkauan air bersih tidak bisa menikmati air yang di sediakan pemerintah.

Dalam membangun sumur gali ada masyarakat yang setuju dan tidak setuju terhadap penempatan Bak air dari program sumur gali tersebut, masyarakat yang setuju adalah masyarakat yang dekat dengan bak air sedangkan yang tidak setuju adalah masyarakat yang jauh dari bak air tersebut. Sehingga pemerintah Desa harus efektif dalam menempatkan dan menyalurkan air bersih terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan jauh dari jangkauan air bersih. Akan tetapi pemerintah menempatkan bak dan menyalurkan ke dua titik sangat tidak strategis atau tidak efektif, karena ke tiga titik mendekati sumur gali masyarakat sebenarnya masyarakat tidak membutuhkan bak karena sudah ada sumur gali sendiri dan memungkinkan masyarakat sekitar menggunakan sumur tersebut. Dapat di simpulkan bahwa penempatan bak air bersih tidak efektifitas dan tidak strategis. Titik pertama dan ke dua berada di dusun III dan titik ke tiga berada di dusun I, Desa Batnun mempunyai jumlah penduduk 2683 jiwa, 674 KK dan terdiri dari 3 Dusun, 24 RT, 8 RK, serta memiliki luas wilayah 19,36 km<sup>2</sup>. Pemerintah membangun bak air dan yang di salurkan masih berada di masyarakat yang bisa mengakses air bersih dengan jarak yang dekat sehingga ini menjadi salah satu problem yang ada di desa Batnun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang "ANALISIS TATA KELOLA AIR (Studi Kasus Program Sumur Gali Pemerintah Desa Batnun)".

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian Ini Menggunakan Metode Pendekatan kualitatif . Pendekatan kualitatif menurut (creswell dalam ulber 2012:260) merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat terselesaikan.

Dengan memberi fokus penelitian pada Tata Kelola Air (Study Kasus: Program Sumur Gali Pemerintah Desa Batnun). Jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif, dimana peneliti akan mendeskripsikan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dapat bersumber dari subjek penelitian dan literatur perpustakaan berupa buku dan jurnal. analisis data pada Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi dengan menggunakan analisa kualitatif. Data yang telah dikumpul, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara mendalam dan

menghasilkan suatu kesimpulan dengan tujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang diamati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan air bersih merupakan bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Dalam konteks Desa Batnun, tata kelola air bersih dianalisis menggunakan pendekatan *Water Governance* yang mencakup dimensi institusional dan kebijakan, ekonomi, sosial dan partisipasi, serta lingkungan. Selain itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, analisis ini juga mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan air bersih di tingkat desa.

Berikut adalah hasil analisis penelitian dari poin a sampai f, yaitu dari dimensi institusional dan kebijakan hingga faktor pendorong dan penghambat tata kelola air bersih di Desa Batnun, disusun secara ilmiah sesuai format skripsi dan menggunakan kerangka teori *Water Governance*:

### a. Dimensi Institusional dan Kebijakan

Secara kelembagaan, Pemerintah Desa Batnun memiliki peran utama dalam merancang dan menjalankan program pengelolaan air bersih melalui program sumur gali. Kepala desa bersama aparatur desa membentuk struktur pengelolaan yang melibatkan pengelola air dan tokoh masyarakat, meskipun secara formal membentuk institusi namun belum terdapat peraturan desa (Perdes) yang secara eksplisit mengatur tata kelola air bersih. Ketiadaan dasar hukum lokal tersebut menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan koordinasi antar pihak dalam pengambilan keputusan serta distribusi air.

Hal ini menunjukkan bahwa dimensi institusional dan kebijakan dalam kerangka *Water Governance* belum berjalan optimal karena tidak adanya peraturan yang mengikat, minimnya dokumentasi kebijakan, dan lemahnya peran kelembagaan dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan. Akibatnya, tata kelola cenderung bersifat *ad hoc* dan reaktif terhadap persoalan yang muncul, bukan berbasis pada rencana jangka panjang yang terstruktur.

### b. Dimensi Ekonomi

Dari aspek ekonomi, pengelolaan air bersih di Desa Batnun menghadapi tantangan dalam pembiayaan dan keberlanjutan operasional. Program sumur gali dibiayai dari Dana Desa, namun belum terdapat sistem pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan iuran dari masyarakat pengguna air. Beberapa informan menyampaikan ketidakjelasan terkait penggunaan iuran yang telah dibayarkan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem pengelolaan dana publik.

Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana iuran mencerminkan lemahnya aspek ekonomi dalam tata kelola air. Selain itu, kerusakan fasilitas seperti pompa air tidak ditangani secara cepat karena keterbatasan dana perawatan dan absennya mekanisme pembiayaan rutin. Hal ini menunjukkan bahwa

aspek ekonomi dalam *Water Governance*, seperti efisiensi biaya, keberlanjutan investasi, dan transparansi fiskal, belum menjadi perhatian utama dalam pengelolaan air bersih di desa ini.

c. Dimensi Sosial dan Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih di Desa Batnun bersifat fluktuatif. Di satu sisi, masyarakat menunjukkan inisiatif dalam mendorong pemerintah desa untuk membangun sumber air, serta memiliki kesadaran dalam menjaga kualitas air. Namun di sisi lain, keterlibatan mereka dalam pemeliharaan fasilitas dan pengambilan keputusan masih terbatas. Beberapa warga juga merasa tidak dilibatkan dalam distribusi manfaat air bersih, yang menyebabkan ketidakpuasan sosial dan potensi konflik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam mekanisme pengelolaan air bersih secara inklusif dan deliberatif. Dalam konteks *Water Governance*, partisipasi yang bermakna dan berkesinambungan merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan tata kelola, karena meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas kolektif terhadap sumber daya air.

d. Dimensi Lingkungan

Kondisi lingkungan memainkan peran penting dalam keberlanjutan pasokan air bersih di Desa Batnun. Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa sebagian besar kampung belum memiliki sumber air selain sungai, dan hanya sebagian kecil wilayah yang memiliki akses air dari sumur gali. Selain itu, masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, seperti tidak membuang limbah dekat sumur dan melakukan penghijauan untuk mencegah kekeringan.

Namun demikian, upaya pelestarian lingkungan belum diatur dalam bentuk kebijakan yang konkret. Belum ada kegiatan penghijauan yang terprogram atau pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari sumber air. Dengan demikian, dimensi lingkungan dalam *Water Governance* di Desa Batnun masih bersifat individual dan belum terlembaga. Hal ini perlu diperkuat agar pelestarian sumber daya air menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan air bersih jangka panjang.

e. Faktor Pendorong Tata Kelola Air Bersih

Faktor utama yang mendorong tata kelola air bersih di Desa Batnun adalah kesadaran akan keterbatasan sumber daya air dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Pemerintah desa menanggapi tuntutan tersebut dengan membangun sumur gali sebagai solusi alternatif. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan dan bekerja sama dengan pemerintah desa menjadi kekuatan sosial yang mendorong implementasi program air bersih.

Dari sisi *Water Governance*, dorongan ini mencerminkan responsivitas kelembagaan terhadap kebutuhan warga (dimensi institusional), serta adanya sinergi antara aktor negara dan masyarakat sipil (dimensi sosial dan partisipatif). Kesadaran kolektif akan pentingnya air bersih dan dukungan warga dalam proses perencanaan

memperkuat legitimasi program tata kelola air yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

#### f. Faktor Penghambat Tata Kelola Air Bersih

Meskipun terdapat faktor pendorong, proses tata kelola air bersih di Desa Batnun menghadapi beberapa hambatan yang signifikan. Hambatan utama adalah seringnya terjadi kerusakan teknis pada pompa air, distribusi air yang belum merata, minimnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan iuran masyarakat. Beberapa kampung tidak terlayani oleh sistem distribusi air, sehingga masyarakat lebih memilih mengambil air dari sungai yang kualitasnya belum tentu memenuhi standar.

Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan tidak adanya evaluasi berkala terhadap program pengelolaan air bersih semakin memperparah kondisi tersebut. Hambatan-hambatan ini menunjukkan lemahnya dimensi teknis, ekonomi, institusional, dan sosial dalam *Water Governance*. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan desa, transparansi fiskal, peningkatan partisipasi publik, serta perluasan cakupan pelayanan agar pengelolaan air bersih dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap program pengelolaan air bersih melalui sumur gali di Desa Batnun, dapat disimpulkan bahwa tata kelola air yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batnun masih belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam kerangka teori *Water Governance*, pengelolaan ini memiliki kelebihan dalam hal inisiatif pemerintah desa dan partisipasi awal masyarakat. Namun, program ini masih menghadapi berbagai tantangan pada dimensi kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara kelembagaan dan kebijakan, belum adanya dasar hukum seperti Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur tata kelola air menyebabkan lemahnya koordinasi dan kejelasan peran para pihak. Dalam dimensi ekonomi, pengelolaan iuran masyarakat tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta belum tersedia sistem pembiayaan pemeliharaan fasilitas yang berkelanjutan. Dimensi sosial menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas, terutama dalam aspek pengawasan, perawatan, dan pengambilan keputusan. Sementara dari sisi lingkungan, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sumber air sudah terbentuk, tetapi belum terlembagakan dalam bentuk program atau kebijakan desa yang konkret.

Faktor pendorong utama dari tata kelola ini adalah kebutuhan mendesak masyarakat akan air bersih dan inisiatif Pemerintah Desa Batnun dalam merespon kondisi keterbatasan sumber daya air. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan seperti kerusakan teknis pompa air, distribusi yang belum merata, rendahnya partisipasi dalam pemeliharaan, serta ketidakjelasan pengelolaan dana. Dengan demikian, tata kelola air bersih di Desa Batnun menunjukkan adanya niat baik dan

potensi berkembang, tetapi memerlukan pembenahan serius agar dapat menjamin akses air yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa.

## **SARAN**

1. Pemerintah Desa perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara khusus tentang tata kelola air bersih, termasuk mekanisme distribusi, pengelolaan iuran, pemeliharaan fasilitas, dan partisipasi masyarakat, agar ada landasan hukum yang jelas.
2. Perlu dibentuk lembaga pengelola air desa yang transparan dan akuntabel, yang melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pengguna air, guna memastikan pengawasan bersama dan peningkatan kualitas layanan.
3. Sistem distribusi air bersih perlu diperluas dan merata agar tidak hanya dinikmati oleh sebagian kampung saja, tetapi mencakup seluruh wilayah desa, terutama kampung-kampung yang saat ini masih bergantung pada sungai.
4. Masyarakat perlu diberdayakan dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti penghijauan dan pengelolaan limbah rumah tangga, untuk menjamin keberlanjutan sumber air dalam jangka panjang.
5. Diperlukan pelatihan teknis dan pembentukan tim perawatan lokal untuk menangani kerusakan teknis seperti pompa air, agar pelayanan tidak terganggu dan tidak sepenuhnya bergantung pada pihak luar.
6. Transparansi dalam pengelolaan dana iuran masyarakat harus ditingkatkan, misalnya melalui laporan keuangan yang diumumkan secara berkala kepada masyarakat pengguna air.
7. Pemerintah Desa Batnun harus melakukan evaluasi untuk menempatkan bak air yang strategis, agar masyarakat dapat menikmati Program Sumur Gali yang dibangun oleh pemerintah Desa

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, tata kelola air bersih di Desa Batnun diharapkan dapat berjalan secara partisipatif, adil, dan berkelanjutan sesuai prinsip *Water Governance*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Araral, E and Wang Y. 2013. Water Governance 2.0: A Review and Second Generation Research Agenda. *Water Resource Manage* (2013) 27;3945- 3957. DOI 10.1007/s11269-013- 0389-x
- Araral, E and Yu, D. 2012. Water governance: Critique, Theory and Evidence from Asia. Available online at [https://www.researchgate.net/profile/Eduardo\\_Araral2/publication/268029924\\_Water\\_governance\\_Critique\\_Theory\\_and\\_Evidence\\_from\\_Asia\\_1/links/567e367108aebccc4e040d1f.pdf?origin=publication\\_list](https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Araral2/publication/268029924_Water_governance_Critique_Theory_and_Evidence_from_Asia_1/links/567e367108aebccc4e040d1f.pdf?origin=publication_list)
- Miles B. Mathew dan Michael Huberman, (1992), Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Sumber Metode-Metode Baru, Jakarta, UIP
- UNDP. (2004). Water Governance For Poverty Reduction. New York: UNDP.

- UNDP. (2013). *Water Governance in the Arab Region*. New York: United Nations Development Programme.
- Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Penerbit: Alfabeta, Bandung
- Jurnal:
- Azlan, A. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Kebutuhan Air Bersih Di Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*.
- Ida Yati, W. t. (2021). *evaluasi pelaksanaan kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di kabupaten purwakarta (studi kasus di desa cikadu kecamatan cibatu)*.
- Isnani, B. P. (2018). *Evaluasi Berjalannya Program Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Kusumawiranti, R. (2022). *Pengelolaan Air Bersih (PAB) Banyuwili Berbasis Masyarakat Di Srimulyo Piyungan Bantul*
- Mardiasmo, (2004), *Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Teece, D. J. (2010). *Business Models, Business Strategy and Innovation*. *Long Range Planning*, 43(2-3), 172-194. DOI: 10.1016/j.lrp.2010.01.004.
- UN-Water Paper, Jan 27th 2014. "A Post-2015 Global Goal for Water: Synthesis of key findings and recommendations from UN-Water. Available at : [http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/1090-eng\\_A\\_Post-2015\\_Global\\_Goal\\_for\\_Water.pdf](http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/1090-eng_A_Post-2015_Global_Goal_for_Water.pdf)
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Van der Kerk, A, etall. 2013. *Opportunities for Water Governance in Indonesia (A Governance Quick Scan under the Indonesian-Dutch Water Management Cooperation)*. Den Haag: Water Governance Center
- Vander Kerk et al (2013). *Oportunitites of water governance indonesia (A Governance Quick Scan Under The Indonesia D utch Water Management Cooperation)* Deen Haag Governance Center.
- Yeri Budiman, S. S. (2017). *kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa kalekube kecamatan tabukan utara kabupaten kepulauan sangihe*.
- Skripsi:
- Ari Azlan (2024). *Skripsi. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DI DESA BATAS KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU*.
- Website:
- Artikel/Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance Diindonesia <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>.
- Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP. Kompas.com. (2022, February 6). May 26, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>.

## Undang-Undang

Undang undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air